

PERAN PBB TERHADAP KRISIS AIR DI MAHARASHTRA

TAHUN 2016-2022

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

NANDA RAYNALDI SYOFYAN

18323119

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

PERAN PBB TERHADAP KRISIS AIR DI MAHARASHTRA

TAHUN 2016-2022

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

NANDA RAYNALDI SYOFYAN

18323119

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN PBB TERHADAP KRISIS AIR DI MAHARASHTRA TAHUN 2016-2022

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal
27 September 2023

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
- 2 Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si.
- 3 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.

Tanda Tangan

Masitoh Nur Rohma
Mohamad Rezky Utama
Rizki Dian Nursita

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 25 Juli 2023



Nanda Raynaldi Syofyan

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillahillobbil'amin, laa haula wa kaa quwwata illa billahi,
Segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang tidak henti-hentinya melimpahkan rahmat, berkah, karunia dan hidayahNya sehingga segala bentuk kenikmatana, kemudahan dan kelancaran selalu tercurah bersama dengan penulis. Segala syukur hamba haturkan kepadaMu yang Maha Pengasih sehingga karya tulis sederhana ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Terima kasih juga kepada:

Almarhum Bapak Bos Syofyandri dan Ibu Yusnidar

Yang telah memberikan dukungan, doa yang tiada pernah hentinya kepada penulis sehingga dapat menjadi pribadi yang membanggakan dan bermanfaat bagi orang-orang disekitar. Nasihat yang selalu diberikan kepada penulis sampai saat ini dijadikan sebagai motivasi untuk menjadi sosok yang baik dan berbakti.

Terima kasih atas segala dukungan yang menuntut penulis untuk dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* selalu menjaga kita semua dalam lindunganNya, *aamiin Allahumma aamiin*.

Seluruh Teman Baik

Yang selalu dengan seta mendengarkan, memberikan dukungan, nasihat dan doa yang tiada hentinya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, semoga duungan dan nasihat yang diberikan kepada penulis dapat dijadikan sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

HALAMAN MOTTO

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri.” – (Q.S Al-Isra: 7)

“Daripada mengkhawatirkan apa yang orang katakan tentang anda, mengapa tidak menghabiskan waktu untuk berusaha meraih sesuatu yang mereka kagumi.”

-Dale Carriage-

“Saat manusia membuat keputusan, hal yang terlihat mejadi berubah walau pagi yang sama, seperti biasanya.”

-JKT48 Masa Depan Yang Menyilaukan Mata-

“Memulai sebuah perjuangan, harus diawali dengan suatu hal yang paling kecil, untuk membentuk sosok yang lebih kuat dan sabar.”

-Nanda Raynaldi Syofyan-

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah robbil alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga dalam penulisan karya tulis ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam juga selalu dihaturkan kepada Rasulullah SAW yang telah berhasil membawa ummatnya dari zaman kegelapan sampai pada zaman yang terang benderang hingga saat ini.

Penulis juga tidak akan bisa menyelesaikan karya tulis ini dengan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari *support system* yang tidak kenal lelah dalam memberikan bantuan, dukungan, nasihat maupun masukkan yang dapat mendorong penulis hingga saat ini. Kebaikan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam tulisan ini, tidak dapat dibayar dalam bentuk apapun dan penulis hanya bisa berharap agar kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dibalaskan oleh Allah SWT. Untuk itu, penulis memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya bagi nama-nama yang berada di bawah ini dengan kalimat yang sesederhana mungkin dari penulis:

1. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., M.Ag., Psikolog, selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A., selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang tiada hentinya untuk memberikan nasihat untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi orang banyak.

4. Miss Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam proses pengerjaan tugas akhir ini dengan memberikan masukan, nasihat, koreksi. Hal tersebut menjadi pondasi yang kuat untuk penulis terus maju dan menyelesaikan tugas akhir ini sampai terselesaikan dengan baik dan banyak sekali masukan dan nasihat yang sangat berguna bagi penulis dalam menghadapi berbagai macam tantangan untuk kedepannya. Terima kasih banyak atas segala kesempatan, motivasi dan dukungan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan sangat baik.
5. Seluruh Dosen Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, atas segala bentuk didikan, bimbingan, pembelajaran, motivasi ketika mengikuti berbagai mata kuliah yang sangat menyenangkan dan berguna hingga pada saat ini. Terima kasih banyak telah menjadi panutan dan memberikan banyak sekali motivasi yang dapat menginspirasi yang di pegang teguh hingga saat ini.
6. Mbak Mardiatul Khasanah, selaku staf program studi Hubungan Internasional yang telah banyak membantu penulis dalam menjawab berbagai pertanyaan dan kesulitan selama menjadi mahasiswa di program studi Hubungan Internasional dari masa awal perkuliahan hingga pada masa penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sangat baik.

7. Almarhum Bos Syofyandri dan Ibu Yusnidar, terima kasih atas segala bentuk kasih dan sayang serta cinta yang diberikan kepada penulis tiada putusnya, selalu menjadi penyemangat penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik. Mohon banyak apabila masih banyak ditemukan berbagai kesalahan, kekeliruan dan sikap yang mungkin tidak mengenakkan di hati kedua orang tua yang terkasih. Mohon maaf jika penulis sampai saat ini masih belum bisa memberikan apapun dan percayalah bahwa suatu saat nanti penulis dapat membanggakan kalian dengan berbagai bentuk pencapaian yang akan di raih pada masa yang akan datang.
8. Oka, Bang Iqbal dan Kak Yola, sebagai saudara kandung yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah saat masih menjadi mahasiswa baru hingga saat ini, terima kasih banyak telah senantiasa memberikan dukungan, nasihat dan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sangat baik.
9. Raditya Septian Perdana, sebagai teman, abang dan *support system* yang sudah berteman sejak duduk di bangku SMA dan telah memperkenalkan program studi Hubungan Internasional kepada penulis. Terima kasih banyak atas segala masukan, dukungan dan semangat kepada penulis dan kebersamai penulis dalam suka maupun duka. Segala bentuk bantuan yang telah diberikan kepada penulis hingga saat ini, termasuk juga dalam pengerjaan tugas akhir akan selalu menjadi kenangan yang tidak akan bisa dilupakan oleh penulis. Tetaplah menjadi saksi atas keberhasilan yang akan dicapai oleh penulis nanti dan tetaplah menjadi

sosok yang selalu membantu dan memberikan kebaikan kepada orang lain, penulis berharap di lain kesempatan dapat bertemu kembali.

10. Febby Wijayanti, sebagai *Soulmate 24/7* yang selalu kebersamai penulis hingga saat ini. Terima kasih banyak telah memberikan masukan, dukungan dan semangat kepada penulis hingga saat ini dan telah menemani penulis dikala waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seperti pergi *kulineran jogja* dan bermain *mobile legends*. Semoga semua hal baik yang telah dilakukan bersama penulis hingga saat ini akan menjadi kenangan yang tidak akan terlupakan dan akan dibalas oleh Allah SWT, *Aamiin*.
11. Luthfi Wahid Al-Akbar, sebagai sahabat rantau pada masa awal perkuliahan hingga saat ini telah banyak membantu penulis dalam hal akademik. Terima kasih banyak atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis hingga karya tulis ini bisa terselesaikan dengan baik, semoga kebaikan yang telah berikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT, *Aamiin*.
12. Anggun Setia Yoanda, sebagai sahabat rantau pada awal masa perkuliahan hingga saat ini banyak memberikan hiburan kepada penulis dan memperkenalkan segala hal tentang medan dan sekitarnya. Terima kasih atas dukungan dan semangatnya kepada penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik, semoga segala kebaikan yang telah diberikan dan dilakukan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT, *Aamiin*.

13. Keluarga Besar *Koprs Mahasiswa Hubungan Internasional* Universitas Islam Indonesia. Terima kasih penulis ucapkan khususnya Divisi Student Resources Development yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat andil dan berkontribusi dalam segala rangkaian kegiatan yang telah dijalankan oleh Divisi Student Resources Development selama 2 periode. Hal ini menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi penulis untuk dapat melakukan pengembangan diri dan mencari pengalaman, sehingga dapat menjadi pribadi yang lebih baik.
14. Seluruh anggota *Art of International Relations*. Terima kasih banyak penulis ucapkan untuk kesempatan yang sangat berharga untuk dapat mengembangkan diri bersama rekan-rekan yang berkualitas, serta semangat dan dukungan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sangat baik.
15. Keluarga Besar *Foreign Policy Community of Indonesia* Universitas Islam Indonesia. Terima kasih banyak atas kesempatan yang sangat berharga selama 2 periode untuk berada di departemen Finance and Marketing dan Public Relations. Banyak hal yang bisa membuat penulis dapat berdiri tegak dengan kemampuan yang penulis miliki untuk mengikuti berbagai kegiatan positif untuk membangun semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, terima kasih kepada rekan yang kebersamai penulis hingga akhir dan terus memberikan semangat kepada penulis, semoga hal baik yang telah diberikan dan dilakukan terhadap penulis akan dibalas dengan sebaik-baiknya oleh Allah SWT, *Aamiin*.

16. Seluruh anggota, teman dan sahabat pengurus *Sedekah Sekitar* Universitas Islam Indonesia. Terima kasih sebanyak-banyaknya penulis ucapkan kepada teman-teman kebaikan yang senantiasa dikala kesibukan terus berbuat kebaikan untuk masyarakat sekitar, terima kasih atas kesempatan yang sangat berharga penulis sampaikan kepada seluruh anggota yang telah ikut andil dan berkontribusi dalam mengembangkan diri selama 2 periode ini, senang rasanya bisa bertemu dengan rekan-rekan sekalian. Terima kasih juga atas doa, dukungan dan semangatnya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sangat baik.

17. Seluruh rekan Mahasiswa/I Program Studi Hubungan Internasional Angkatan 2018, sebagai rekan seperjuangan yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga saat ini, kesempatan yang sangat berharga bagi penulis untuk bisa kenal dan dekat dengan rekan-rekan semua. Semoga apa yang telah dilakukan bersama dari awal masa perkuliahan hingga saat ini, nantinya akan bermanfaat di kemudian harinya dan penulis berharap dimanapun teman-teman semua berada, semoga sukses dengan jalannya masing-masing, *Aamiin*.

Yogyakarta, 19 November 2023

Nanda Raynaldi Syofyan

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan penelitian	5
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran	7
1.7 Argumen Sementara	9
1.8 Metode Penelitian	10
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i>	10
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	10
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	11
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i>	11
1.9 Sistematika Pembahasan	11
BAB 2 KRISIS AIR DI MAHARASHTRA	13
2.1. Krisis Air di Maharashtra tahun 2016	13
2.2. Sistem Pemerintah Negara Bagian Maharashtra	17
2.3. Sustainable Development Goals 6	18
2.4. Upaya Pemerintah Dalam Menghadapi Krisis Air	20
BAB 3 PERAN PBB TERHADAP KRISIS AIR DI MAHARASHTRA	24
3.1. Melakukan Pemantauan Melalui Kerja sama dengan Aktor Lain	25
3.2 Pengembangan Kapasitas, Bantuan Teknis, dan Keuangan	28
3.3 Otoritas dan Legitimasi	32
3.4 Kontrol terhadap Informasi	34
BAB 4 PENUTUP	37
4.1. Kesimpulan	37
4.2 Rekomendasi	42
DAFTAR PUSTAKA	43

DAFTAR TABEL

Table 1. Pendekatan Implementasi Organisasi Internasional	8
Table 2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Poin 6	18
Table 3. Kerja sama Sektoral IMI-SDG6	26
Table 4. Pelaksanaan Agenda PBB	27
Table 5. Laporan Pembangunan Air PBB	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rata-Rata Curah Hujan Bulanan di Maharashtra tahun 2016	14
Gambar 2. Lapisan Konflik Masyarakat di Pedesaan Maharashtra	15
Gambar 3. Program Jal Shakti Abhiyan	20
Gambar 4. 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	21

DAFTAR SINGKATAN

AIP	: <i>Africa Investment Programme</i>
DAS	: <i>Daerah Aliran Sungai</i>
DWLAI	: <i>Dalit Women's Livelihoods Accountability Initiative</i>
FAO	: <i>Food and Agriculture Organization</i>
GLAAS	: <i>Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking Water</i>
GEMS	: <i>Global Environment Monitoring System for Water</i>
GSDA	: <i>Groundwater Survey and Development Agency</i>
GSDP	: <i>Gross State Domestic Product</i>
HLPF	: <i>High-Level Political Forum</i>
IMI-SDG6	: <i>Integrated Monitoring Initiative for SDG 6</i>
IWRM	: <i>Integrated Water Resources Management</i>
JSA	: <i>Jal Shakti Abhiyan</i>
JSA:CTR	: <i>Jal Shakti Abhiyan: Catch The Rain</i>
JMP	: <i>Joint Monitoring Programme</i>
MWIC	: <i>Maharashtra Water and Irrigation Commission</i>
MWRRRA	: <i>Maharashtra Resources Regulatory Authority</i>
NBA	: <i>Niger Basin Authority</i>
OI	: <i>Organisasi Internasional</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
SDG's	: <i>Sustainable Development Goals</i>
UNESCO	: <i>United Nations Educational Scientific and Cultural Organization</i>
UNEP	: <i>United Nations Environment Programme</i>
UN-Water	: <i>United Nations Water</i>
UNSD	: <i>United Nations Statistics Division</i>
USAID	: <i>United State Agency for International Development</i>
WASH	: <i>Water, Sanitation, Hygiene</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>
WMO	: <i>World Meteorologi Organization</i>
WWAP	: <i>World Water Assessment Programme</i>
WWRD	: <i>World Water Report Development</i>

ABSTRAK

Pada tahun 2016, Pemerintah Negara Bagian Maharashtra harus dihadapkan dengan situasi kekeringan air yang berkepanjangan, hal ini disebabkan oleh sistem pengelolaan air yang salah oleh pemerintah, pemilihan tanaman produksi, Fenomena El Nino dan monsun yang lemah. Masyarakat, Petani dan Lingkungan terkena dampak serius akibat krisis air yang berkepanjangan di Maharashtra. Pemerintah Negara Bagian Maharashtra perlu melakukan *Sustainable Development Goals* (SDG's) terhadap air bersih dan sanitasi. Hal tersebut ternyata berkaitan dengan peran dan tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui konsep Organisasi Internasional dan Implementasi menggunakan pendekatan managerial dan normatif.

Kata Kunci: Krisis Air Maharashtra, Organisasi Internasional dan Implementasi, *Sustainable Development Goals* (SDG's), PBB.

ABSTRACT

In 2016, the Maharashtra State Government had to face a prolonged water drought situation, this was caused by the government's faulty water management system, crop selection, the El Nino phenomenon and a weak monsoon. People, Farmers and Environment are seriously affected by the prolonged water crisis in Maharashtra. The Maharashtra State Government needs to implement Sustainable Development Goals (SDG's) regarding clean water and sanitation. This turns out to be related to the role and objectives of the United Nations (UN). Through the concept of International Organization and Implementation using a managerial and normative approach.

Keywords: Maharashtra Water Crisis, International Organizations and Implementation, Sustainable Development Goals, UN.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air memiliki peran yang penting terhadap pembangunan berkelanjutan, hal ini berkaitan dengan upaya pemenuhan terhadap hak masyarakat mengenai ketersediaan air bersih. Dengan meningkatnya pertumbuhan populasi masyarakat secara global, mempengaruhi peningkatan atas permintaan sumber daya air secara komersial. Sehingga dalam hal ini kita dapat melihat bahwa air dan sanitasi merupakan satu kesatuan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan. Manfaat air dan sanitasi dapat menjadi faktor pendorong dalam peningkatan perekonomian, baik di negara pusat maupun negara bagian (United Nations 2023).

India adalah negara yang menganut sistem pemerintahan Republik Federal. Dalam hal ini pemerintah federal dan pemerintah negara bagian memiliki hak yang sama, akan tetapi dengan tanggung jawab yang berbeda berdasarkan wilayah. Berdasarkan kedudukannya, pemerintah federal dan negara bagian memiliki kebebasan dalam mengatur bentuk pemerintahannya (Kemlu 2023). Pada tahun 2016, Pemerintah Negara Bagian Maharashtra harus dihadapkan dengan situasi kekeringan air yang berkepanjangan, hal ini disebabkan oleh sistem pengelolaan air yang salah oleh pemerintah, pemilihan tanaman produksi, Fenomena El Nino dan monsun yang lemah (Chakraborty 2018). Masyarakat, Petani dan Lingkungan terkena dampak serius akibat krisis air yang berkepanjangan di Maharashtra. Selain itu faktor utama yang memperparah situasi krisis air di Maharashtra terletak pada perkebunan tebu. Di samping itu elit politik ikut serta dalam tindakan eksploitasi

besar-besaran terhadap sumber daya air yang digunakan dengan skala yang tidak wajar dalam produksi perkebunan tebu, tidak ada yang menaruh kecurigaan terhadap tindakan tersebut (Dnyanoba Gutte 2022).

Pemerintah Negara Bagian Maharashtra langsung mengambil satu langkah pasti dalam mengatasi permasalahan air. Pada tahun 2016, pemerintah menyediakan kurang lebih 5.923 kapal tanker yang bermuatan air 10.000 liter untuk diberikan kepada masyarakat pedesaan di Negara Bagian Maharashtra setiap harinya. Dalam hal ini pemerintah juga mengkhawatirkan spesies lainnya dengan memberikan himbauan agar dapat menyediakan pakan dan juga air. Pemerintah Negara Bagian Maharashtra masih terbelenggu dengan situasi krisis air yang semakin parah dan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan air ini begitu besar. Pemerintah melakukan upaya lain untuk menekan biaya dalam mengatasi permasalahan ini, yaitu dengan cara memanfaatkan pohon, vegetasi dan semak-semak yang berada di lingkungan masyarakat sebagai pengganti dari pakan hewan ternak. Pada situasi yang sama, ternyata dibalik langkah yang dilakukan oleh pemerintah berdampak langsung pada lingkungan yang berujung pada degradasi tanah (P. Manoj 2019).

Dalam menghadapi permasalahan krisis air, Pemerintah Negara Bagian Maharashtra perlu melakukan *Sustainable Development Goals* (SDG's) terhadap air bersih dan sanitasi. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan akses dalam pemenuhan terhadap ketersediaan air bersih (United Nations 2023). Selain itu Pemerintah Negara Bagian Maharashtra juga membangun sebuah otoritas yang dikenal dengan *Maharashtra Resources Regulatory Authority* (MWRRA) dengan tujuan agar dapat membuat kebijakan yang berfokus pada air dan sanitasi (World

Bank 2019). Pemerintah Negara Bagian Maharashtra merasa bahwa krisis air yang terjadi dapat diselesaikan dengan beberapa tahapan, di antaranya: konservasi air, pengikisan air tanah dan pemanenan air hujan, lalu dilakukannya perbaikan infrastruktur dan pengisian ulang air pada tempat-tempat yang mengalami kekeringan seperti kolam, danau, tangka air maupun lahan basah (Studio18 2022).

Berdasarkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Negara Bagian Maharashtra dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDG's) terkait air bersih dan sanitasi. Hal tersebut ternyata berkaitan dengan peran dan tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB merupakan satu kesatuan dalam membantu menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh setiap negara anggota yang tergabung di dalamnya, fokus utama PBB dalam hal ini tentunya memberikan dukungan secara langsung melalui tiga tahapan di antaranya: PBB memberikan informasi terkait proses kebijakan dalam mengatasi permasalahan air dan sanitasi, PBB memberikan dukungan dengan melakukan pemantauan dan membuat laporan tahunan yang bermanfaat bagi negara yang tergabung, PBB juga melakukan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan yang dapat menginspirasi setiap bentuk pemerintah dalam mengambil keputusan (United Nations 2023).

PBB memposisikan diri sebagai Organisasi Internasional, dalam upaya penerapan perjanjian internasional melalui: Perjanjian Paris pada tahun 2015 dalam kerangka konvensi PBB yang berkaitan dengan Perubahan Iklim, Agenda Aksi yang diselenggarakan Addis Ababa pada tahun 2015 mengenai Pembiayaan Pembangunan, Kerangka Kerja Sendai pada tahun 2015 hingga 2030 dalam upaya Mengurangi Resiko terjadinya Bencana dan Agenda pada tahun 2030 mengenai Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan dari *Sustainable Development Goals 6*

(SDG's 6) memastikan bahwa ketersediaan terhadap air bersih dan sanitasi akan terus berkembang dan dirasakan oleh masyarakat di masing-masing negara, sehingga dalam hal ini SDG 6 di berbagai aspek dapat memperhitungkan bagaimana tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan krisis air dan sanitasi yang terjadi di Negara Bagian Maharashtra (United Nations 2023).

Selain itu PBB juga melakukan inisiatif terhadap pemantauan yang terkoordinasi dan terintegrasi dalam mencapai SDG 6, melalui laporan kemajuan dan perkembangan mengenai air dan sanitasi. Pada tahun 2018, PBB meluncurkan program yang berhubungan dengan pelaksanaan Agenda 2030, mengenai Dekade Aksi Air yang akan berlangsung pada tahun 2018 hingga 2028 yang akan digunakan sebagai tolak ukur dalam pembangunan berkelanjutan. Di tahun yang sama PBB meluncurkan Laporan Sintesis SDG 6 dengan cakupan yang lebih luas dan melakukan eksplorasi dalam mengatasi permasalahan air dan sanitasi. Lalu pada tahun 2019, PBB melalui program kerja Portal Data SDG 6 yang menjanjikan ini memiliki tujuan untuk menyatukan seluruh data dan indikator SDG 6 secara global, serta melakukan pelacakan berkala terkait kemajuan yang terjadi pada perkembangan portal tersebut secara keseluruhan. PBB pada akhirnya akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas serta dukungan dalam mencapai kesepakatan internasional mengenai air dan sanitasi (United Nations 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran PBB terhadap krisis air di Maharashtra tahun 2016-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama Pemerintah Negara Bagian Maharashtra dalam mencapai *Sustainable Development Goal 6* (SDG 6) mengenai air dan sanitasi dalam menghadapi krisis air pada tahun 2016-2022.

1.4 Cakupan penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran PBB bersama Pemerintah Negara Bagian Maharashtra melalui *Sustainable Development Goal* (SDG) terhadap air dan sanitasi. Melalui program dan perencanaan yang akan dilaksanakan oleh PBB dengan memastikan bahwa ketersediaan air dan sanitasi akan terus berkembang dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Penulis memberikan batasan terhadap ruang lingkup penelitian ini pada saat krisis air di Negara Bagian Maharashtra berada pada titik rendah.

Pada tahun 2016, Negara Bagian Maharashtra kembali dihadapkan dengan situasi krisis air yang berkepanjangan, disebabkan oleh berbagai macam faktor yang memperparah permasalahan air dan sanitasi. Hingga pada tahun 2022, ditandai dengan Perjanjian Paris berkaitan dengan Perubahan Iklim, Agenda Aksi yang akan dilaksanakan oleh Addis Ababa mengenai Pembiayaan Pembangunan, Kerangka Kerja Sendai dalam upaya mengurangi resiko terjadinya bencana, Agenda 2030 berisikan tentang pembangunan berkelanjutan, lalu program kerja yang dibuat oleh PBB terkait Dekade Air Aksi pada tahun 2018 hingga 2028, Laporan Sintesis & Portal Data SDG 6.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam artikel yang ditulis oleh Putu Merry Sukma Sasmitha tentang “*Upaya Pemerintah India Menggunakan Bantuan United State Agency for International Development (USAID) Dalam Menangani Krisis Air Bersih dan Sanitasi*”. Menguraikan tentang penanganan krisis air di India dengan bantuan badan internasional Amerika yaitu USAID dengan meluncurkan beberapa program di antaranya adalah Swachh Bharat Mission dengan fokus memberikan bantuan dalam mengatasi permasalahan krisis air dan sanitasi. Dalam hal ini bantuan dari badan internasional memiliki peranan yang sangat penting, sehingga proses yang harus dilalui oleh negara India yang masih memerlukan bantuan dari berbagai pihak asing ini, membuat posisi dari pemerintahan India sendiri tidaklah lemah. Pemerintah India yang independent ini memanfaatkan strategi dengan sangat baik dalam mengelola bantuan dari pihak asing, dengan memberikan edukasi terhadap pembenahan infrastruktur dan bantuan teknis, sebagai bentuk langkah dalam mengatasi permasalahan krisis air dan sanitasi di India (Putu Merry Sukma Sasmitha 2020).

Dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Josina Augusthina Yvonne Wattimena tentang “*Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat*”. Menjelaskan mengenai pemenuhan terhadap air bersih telah diterapkan berdasarkan ketentuan hukum yang bersifat Soft Law. Dalam hukum internasional terdapat prinsip dasar yang mengarah pada tindakan pemerintah untuk dapat menghindari situasi yang dapat melanggar perjanjian yang telah diratifikasi, karena pemenuhan atas ketersediaan air bersih merupakan suatu hal yang fundamental bagi hak asasi manusia. Oleh sebab itu, hak atas ketersediaan

terhadap air bersih memiliki ruang lingkup yang sangat luas, di antaranya mencakup lingkungan hidup dan kesehatan (Wattimena 2021).

Dalam artikel yang ditulis oleh Govind Katalakute tentang “*Impact of Drought on Environmental, Agricultural and Socio-Economic Status in Maharashtra State, India*”. Menjelaskan bahwa kekeringan merupakan hasil dari krisis air yang terjadi di Maharashtra yang berdampak langsung pada penurunan hasil panen para petani, tanaman maupun manusia. Dalam ruang lingkup yang berkesinambungan sektor sosial, ekonomi, petani dan lingkungan menyebabkan dampak serius seperti kelaparan, yang disebabkan oleh kurangnya ketersediaan terhadap makanan dan minuman. Lalu degradasi lahan yang mempengaruhi lingkungan, telah terjadi penurunan pada populasi ternak serta produksi industri dan hasil panen para petani yang menurun secara tidak menentu. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan krisis air dan kekeringan yang akan terjadi di masa yang akan datang adalah dengan menerapkan Teknik dan perencanaan konservasi air dan melakukan pengembangan pada Daerah Aliran Sungai (Govind Katalakute 2016).

1.6 Kerangka Pemikiran

Organisasi Internasional (OI) merupakan salah satu aktor non-pemerintahan yang sudah banyak melakukan peningkatan terhadap peran dan fungsinya semenjak kemunculan globalisasi pada saat Perang Dingin, sehingga dalam hal ini penulis memutuskan untuk menggunakan Teori Organisasi Internasional dan Implementasi yang ditulis oleh Jutta Joachim, Bob Reinalda dan Bertjan Verbeek. Di dalam buku Organisasi Internasional dan Implementasi terdapat tiga pendekatan yang

memperlihatkan bagaimana sebuah sistem internasional dapat bekerja dan memiliki hubungan dengan pemerintah dan hukum internasional. Sehingga berbagai perangkat kebijakan yang telah ada, dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan implementasi.

Table 1. Pendekatan Implementasi Organisasi Internasional

Pendekatan	<i>Enforcement</i>	<i>Managerial</i>	<i>Normative</i>
Sifat	Memaksa	Terbuka dan dapat dikelola	Berlandaskan pada kepercayaan
Metode	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengawasan melalui berbagai aktor. Memberikan <i>Sanksi</i> ekonomi, militer, maupun <i>Tindakan Naming and Shaming</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan <i>Pemantauan</i> melalui berbagai aktor. Bekerja sama dengan berbagai aktor. Membantu negara dalam mengembangkan <i>Kapasitasnya</i>. Memberikan bantuan secara teknis dan keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Menekankan pada otoritas dan legitimasi. Melakukan kontrol terhadap informasi.

Sumber: (Jutta Joachim 2007, 9).

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan *Managerial Approach* dan *Normative Approach* untuk melihat peran PBB dalam mengatasi krisis air di Negara Bagian Maharashtra. Program yang dilaksanakan oleh PBB cenderung memiliki sifat terbuka dan lebih menekankan pada bentuk kerja sama dengan lembaga yang berada dibawahnya.

Pertama, implementasi terhadap program yang ingin dilakukan melalui pendekatan *Managerial Approach* ini menekankan pada pemecahan masalah, pengembangan kapasitas negara, melakukan pemantauan dan intrepetasi terhadap peraturan yang harus dipatuhi. Pendekatan ini meyakini bahwa aktor-aktor luar seperti PBB hingga lembaga dibawahnya yang berperan penting dalam

mengimplementasikan perjanjian internasional. Organisasi internasional juga memberikan bantuan teknis dalam membangun kapasitas sumber daya manusia yang ada, serta bantuan keuangan kepada negara anggota.

Kedua, implementasi terhadap program yang ingin dilakukan melalui pendekatan *Normative Approach*. Pendekatan normatif sering disangkut-pautkan dengan pendekatan konstruktivis, sehingga dalam hal ini organisasi internasional mendapatkan kepercayaan dari negara-negara anggota sebagai aktor penting yang memiliki otoritas untuk membuat suatu negara patuh terhadap kesepakatan internasional yang telah disepakati.

Pemerintah India dan Pemerintah Negara Bagian Maharashtra telah memiliki komitmen dalam upaya implementasi SDG poin 6 dengan menandatangani Resolusi PBB mengenai “*Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*” yang bertujuan untuk menguji komitmen dari seluruh pemerintahan negara anggota yang tergabung ke dalam PBB dalam menegakkan aturan dan hukum, Perjanjian Paris yang berkaitan dengan perubahan iklim pada tahun 2015, Agenda Aksi yang dilaksanakan di Addis Ababa Ethiopia pada tahun 2015 mengenai pembiayaan pembangunan, Kerangka Kerja Sendai dalam upaya mengurangi resiko terjadinya bencana yang diperkirakan akan berlangsung dari tahun 2015 hingga 2030, Agenda tahun 2030 dalam upaya mencapai SDG poin 6 dengan memastikan bahwa ketersediaan terhadap air bersih dan sanitasi akan terus berkembang dan dirasakan oleh masyarakat di masing-masing negara.

1.7 Argumen Sementara

Dalam penelitian ini, argument sementara penulis mengenai peran PBB dalam membantu Pemerintah Negara Bagian Maharashtra mengatasi krisis air, di

landaskan pada kesepakatan yang sudah disepakati. Di antaranya dalam mengimplementasikan SDG poin 6 melalui, Resolusi PBB, Perjanjian Paris, Agenda Aksi, Kerangka Kerja Sendai, Agenda tahun 2030. Krisis air bersih dan sanitas merupakan sebuah ancaman yang harus segera di tangani oleh pemerintah dengan bantuan organisasi internasional, masyarakat Negara Bagian Maharashtra sudah merasa putus asa dalam menghadapi situasi yang mengancam kehidupan mereka. Sehingga dengan adanya upaya yang dilakukan oleh PBB sebagai organisasi internasional akan memberikan dampak perubahan yang besar bagi Pemerintah Negara Bagian Maharashtra dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada implementasi poin 6.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian ini adalah kualitatif, dengan cara mengumpulkan dan mengamati data mengenai permasalahan sosial yang sedang terjadi di sekitar kita (Rahmat 2009, 2).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah PBB dan badan-badan dibawah PBB. Sedangkan objeknya adalah aksi dalam menanggulangi krisis air di Maharashtra.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Data Sekunder, data yang tidak diperoleh secara langsung. Penelitian ini memperoleh data mengacu pada beberapa sumber diantaranya Buku, Jurnal, Website Resmi Pemerintah, *E-book* dan Internet.

1.8.4 Proses Penelitian

Penulis terlebih dahulu menentukan topik pembahasan yang akan diangkat, lalu melakukan riset dan mengumpulkan literatur melalui media *online* dan media *cetak* sebagai pendukung dalam penelitian. Sumber tersebut sangat diperlukan dalam penelitian ini, karena penulis dapat mengetahui persoalan yang sedang terjadi secara aktual.

1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan:

1. **BAB 1 – PENDAHULUAN** pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikir, argumen sementara, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. **BAB 2 – KRISIS AIR DI MAHARASHTRA** pada bab ini penulis akan menjelaskan pada bab ini akan menjelaskan mengenai krisis air Maharashtra pada tahun 2016, sistem pemerintah Maharashtra, Sustainable Development Goals 6, upaya pemerintah dalam menghadapi krisis air.

3. **BAB 3 – PERAN PBB TERHADAP KRISIS AIR DI MAHARASHTRA** pada bab ini akan menjelaskan mengenai analisis mengapa PBB berupaya membantu negara yang mengalami situasi permasalahan krisis air bersih dan sanitasi ditinjau berdasarkan program dan kesepakatan yang dijadikan sebagai pondasi dalam mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan poin 6, ditinjau dari konsep organisasi internasional dan implementasi.
4. **BAB 4 – KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

BAB 2

KRISIS AIR DI MAHARASHTRA

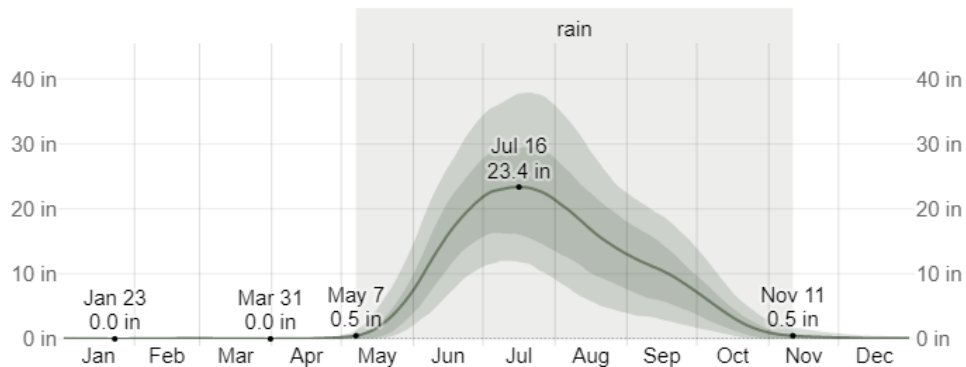
2.1. Krisis Air di Maharashtra tahun 2016

Pemerintah Negara Bagian Maharashtra harus dihadapkan pada permasalahan air yang terjadi pada tahun 2016 hingga 2022. Hal ini disebabkan oleh sistem pengelolaan air yang salah oleh pemerintah, pemilihan tanaman produksi, Fenomena El Nino dan monsun yang lemah (Chakraborty 2018). Pada tahun 2013 *Maharashtra Water and Irrigation Commission* (MWIC) telah memberikan peringatan kepada Pemerintah Negara Bagian Maharashtra untuk segera menghentikan produksi tebu yang menjadi faktor utama dalam permasalahan krisis air bersih dan sanitasi. Pemerintah Negara Bagian Maharashtra tidak memberikan tanggapan apapun terhadap peringatan yang diberikan, malah sebaliknya masih terus aktif memberikan dukungan terhadap produksi tebu untuk menyokong perekonomian (Dongray 2016).

Krisis air di Negara Bagian Maharashtra semakin di perparah dengan adanya fenomena El Nino yang terjadi disepanjang tahun serta cuaca ekstrim yang menyebabkan rata-rata curah hujan tahunan menjadi tidak beraturan. Fenomena El Nino ini berkaitan langsung dengan perubahan cuaca yang tidak menentu, termasuk juga pada penurunan curah hujan (Irawan 2006, 23). Negara Bagian Maharashtra dikenal sebagai kawasan yang kaya akan sumber daya alam mineralnya dan memiliki posisi yang strategis, sehingga menimbulkan berbagai macam pertanyaan terkait apakah dampak yang dihasilkan oleh fenomena El Nino ini begitu besar dan menyebabkan krisis air yang berkepanjangan (Weather Spark 2023).

Sejak tahun 2016 hingga 2022, curah hujan tahunan di Negara Bagian Maharashtra mengalami penurunan yang signifikan berdasarkan gambar berikut:

Gambar 1. Rata-Rata Curah Hujan Bulanan di Maharashtra tahun 2016



Sumber: (Weather Spark 2023).

Dalam kurun waktu 1 tahun, Negara Bagian Maharashtra memiliki dua periode penurunan curah hujan. Periode diguyur hujan terjadi pada bulan Mei hingga November yang berada di titik 0,5 inci dan bulan terbanyak mendapatkan curah hujan, terjadi pada bulan Juli yang mencapai titik 23,4 inci. Sedangkan periode tidak diguyur hujan terjadi pada bulan November hingga Mei (Weather Spark 2023).

Melihat pada kondisi yang sedang terjadi, tentunya memberikan dampak serius bagi masyarakat yang sangat bergantung pada curah hujan, terutama petani. Pemerintah Negara Bagian Maharashtra mempunyai peran dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat (Tjutju Susana 2003). Sekitar 118.368.187 masyarakat di Negara Bagian Maharashtra masih terbelenggu bayangan terhadap monsun yang lemah, sebanyak 3.000 desa di Negara Bagian Maharashtra dihadapkan pada situasi penurunan terhadap tingkatan air tanah yang mencapai titik terendah. Melalui *Groundwater Survey and Development Agency* (GSDA) telah mengeluarkan laporan mengenai air tanah,

dengan asumsi bahwa pengisian terhadap air tanah di berbagai desa yang ada di Negara Bagian Maharashtra tidak akan terpenuhi dengan baik, karena penurunan curah hujan yang berada pada titik terendah (Anjali Marar 2018).

Permasalahan terkait krisis air di Negara Bagian Maharashtra ini menjadi konflik yang sangat kompleks bagi masyarakat, terutama di pedesaan. Hal tersebut bisa didasarkan pada faktor perubahan iklim, penekanan sosial dan kebijakan air.

Gambar 2. Lapisan Konflik Masyarakat di Pedesaan Maharashtra



Perubahan iklim bisa terjadi kapan saja dengan jangka waktu yang bersamaan. Situasi ini bisa di kategorikan sebagai kondisi kronis (kekeringan) atau akut (banjir). Berdasarkan situasi yang terjadi di Negara Bagian Maharashtra dapat dikatakan sebagai kondisi kronis (kekeringan), hal ini disebabkan oleh fenomena El Nino yang terjadi di sepanjang tahun dan mengakibatkan rata-rata curah hujan yang tidak menentu dan terjadinya penipisan air tanah pada titik terendah (Anuj Ghanekar 2019).

Selama situasi krisis air ini, masyarakat di pedesaan, terutama di daerah pemukiman telah mendapatkan tekanan sosial di lingkungan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh salah satu sumber air yang terbatas dan sering digunakan oleh masyarakat pemukiman telah terkontaminasi dengan kotoran manusia. Masyarakat

pemukiman terutama perempuan menjadi target dalam mendapatkan siksaan, kekerasan, dilecehkan dan di ancam demi mendapatkan air (Anuj Ghanekar 2019).

Penerapan terhadap kebijakan air sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan air bersih dan sanitasi. Kebijakan air tidak dapat terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan oleh elit politik yang memiliki hak istimewa dalam upaya eksploitasi air besar-besaran dalam memenuhi produksi tebu (Anuj Ghanekar 2019). Pada tahun 2030 diperkirakan akan mengalami situasi kekeringan yang parah, hal ini berdampak langsung bagi 40% populasi manusia yang ada di dunia. Sekitar 700 juta orang akan melakukan migrasi untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan mendapatkan ketersediaan air bersih yang cukup (WHO 2023).

Pemerintah Negara Bagian Maharashtra berusaha untuk menekan biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan krisis air dan sanitasi dengan memanfaatkan pohon, vegetasi dan semak-semak yang berada di lingkungan masyarakat sebagai pakan hewan ternak. Pada akhirnya langkah yang diambil oleh pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya seadanya, mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berujung pada degradasi tanah (P. Manoj 2019). Situasi krisis air yang diperparah dengan kekeringan, menyebabkan kualitas udara menjadi lebih buruk akibat badai debu yang disebabkan oleh kebakaran hutan, akibat memanfaatkan pohon, vegetasi dan semak-semak demi menekan biaya yang harus dikeluarkan dalam mengatasi permasalahan air bersih dan sanitasi.

Petani adalah salah satu kelompok yang selalu terkena dampak dari situasi kekeringan yang diimbangi dengan krisis air, hal ini menimbulkan kekhawatiran dan ketergantungan para petani terhadap curah hujan yang mendorong mereka untuk memperoleh sumber makanan dari hasil panen. Oleh karena itu air memiliki

peran penting terhadap aktivitas produksi pada sektor pertanian dan menjadi salah kunci penting dalam mempertahankan kondisi pangan pada tingkatan yang lebih rendah. Krisis air yang terjadi di Negara Bagian Maharashtra sering kali menjadi berita utama di dalam pemberitaan, sehingga membuat para petani berupaya untuk mengatasi kerentanan pada tekanan air (Kumar 2023). Petani yang menaruh harapan besar terhadap curah hujan merasa putus asa dalam menghadapi situasi kekeringan ini, berdasarkan hasil panen yang mengalami penurunan secara drastis mengakibatkan para petani memilih untuk mengakhiri hidup sebagai bentuk pembebasan diri akibat krisis air yang tidak berkesudahan (Chakraborty 2018).

2.2. Sistem Pemerintah Negara Bagian Maharashtra

Posisi Negara Bagian Maharashtra berada diantara barat dan tengah kawasan India, Maharashtra berdiri pada tanggal 1 Mei 1960 dan menempati urutan kedua dan ketiga sebagai negara terbesar dan terluas dilihat dari luas daratannya. Sistem Pemerintah Negara Bagian Maharashtra adalah Republik Federal yang mana dalam hal ini mengacu pada bentuk sistem pemerintah India. Pemerintah federal dan pemerintah negara bagian memiliki hak yang sama dalam menentukan bentuk pemerintahannya, namun yang membedakan adalah tanggung jawab yang berbeda berdasarkan wilayah kepemimpinan. Pemerintah Negara Bagian Maharashtra memiliki dampak yang besar terhadap politik di kawasan India, hal ini didasarkan pada pengembangan infrastruktur industry, sosial dan fisik secara baik. Negara Bagian Maharashtra dapat dikatakan sebagai negara terkemuka di kawasan India, Pada tahun 2021 hingga 2022 terjadi peningkatan terhadap *Gross State Domestic Product* (GSDP) mencapai Rs.31,97 triliun, hal ini adalah pencapaian

terbesar bagi Pemerintah Negara Bagian Maharashtra di antara negara bagian lainnya yang ada di kawasan India (Unacademy 2023).

2.3. Sustainable Development Goals 6

Sustainable Development Goals 6 (SDG's 6) biasa dikenal dengan pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2015, PBB bersama negara-negara anggota menyetujui 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan target ambisius dan ingin dicapai pada tahun 2030 mendatang. Hal ini melihat bahwa cakupan pada tujuan pembangunan berkelanjutan ini berfokus pada ekonomi, pembangunan sosial dan lingkungan. Selain itu PBB bersama negara anggota lainnya juga ingin menciptakan tatanan dunia yang lebih baik pada tahun 2030, dengan melakukan upaya memberantas kemiskinan, memerangi terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi, serta mengatasi urgensi terhadap perubahan iklim (United Nations 2023).

Berfokus pada SDG poin 6 memiliki tujuan dalam menjamin ketersediaan terhadap pengelolaan air dan sanitasi untuk semua, adapun 8 target yang ingin dicapai oleh SDG poin 6 pada tahun 2030 mendatang, diantaranya:

Table 2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Poin 6

Poin	Keterangan
6.1	Tercapainya akses terhadap air minum secara aman, adil, universal dan terjangkau bagi semua.
6.2	Memberikan perhatian khusus terhadap perempuan dan anak dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi dan kebersihan dengan mengakhiri permasalahan mengenai praktik buang air besar yang dilakukan sembarangan oleh masyarakat.
6.3	Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi proporsi terhadap air limbah yang tidak diolah dengan baik
6.4	Meningkatkan efisiensi terhadap penggunaan air secara signifikan di berbagai sektor dengan memastikan bahwa setiap pasokan air bersih

	yang digunakan dapat berlanjut dalam mengatasi permasalahan kelangkaan air.
6.5	Melaksanakan sistem pengelolaan sumber daya air secara terpadu di semua tingkatan diantaranya juga bisa melalui kerja sama lintas batas.
6.6	Berusaha untuk melindungi serta memulihkan ekosistem yang berhubungan dengan air, baik hutan, pegunungan, lahan basah, sungai maupun danau.
6a	Memperluas jaringan kerja sama internasional dan memberikan dukungan dalam peningkatan terhadap kapasitas negara-negara berkembang dalam kegiatan maupun program terkait air dan sanitasi.
6b	Memberikan dukungan serta memperkuat partisipasi dari masyarakat lokal dalam melakukan peningkatan terhadap pengelolaan air dan sanitasi.

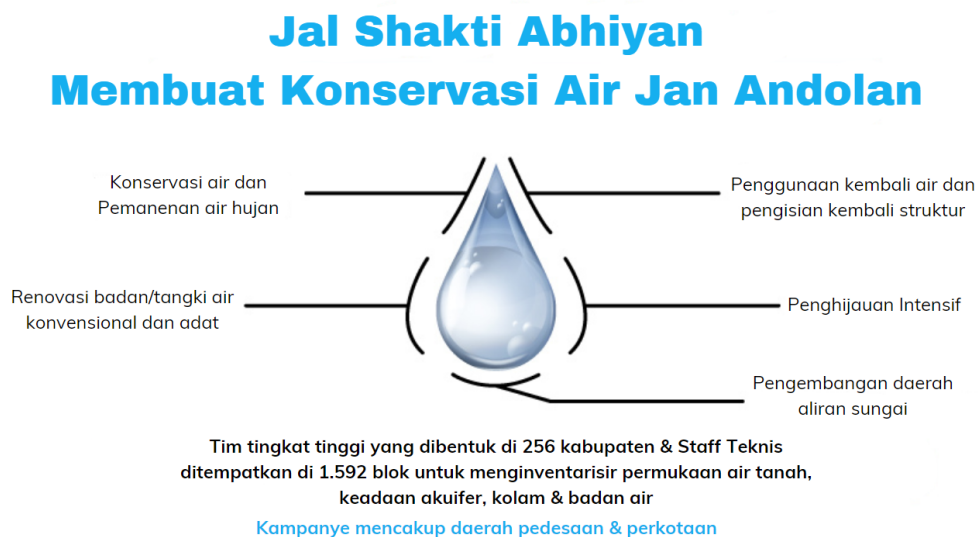
Sumber: (United Nations 2023).

SDG Summit 2023 berlangsung pada tanggal 18-19 September 2023 di New York, hal tersebut menandakan bahwa fase baru terhadap kemajuan menuju pembangunan berkelanjutan melalui panduan politik tingkat tinggi dalam tindakan transformasi yang bisa dilakukan untuk mencapai percepatan menjelang tahun 2030 mendatang. Melalui SDG Summit 2023 ini akan memberikan tanggapan terkait dampak dari berbagai krisis yang saling berkaitan yang harus dihadapi dunia dan bisa memberikan peluang, optimis dan antusias terhadap Agenda 2030 yang akan dilaksanakan nantinya (United Nations 2023). Melalui laporan sintesis SDG poin 6 yang berisikan tentang ringkasan terhadap hasil nyata dengan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan dalam mengambil keputusan bagi negara anggota. Sehingga dalam hal ini terbentuknya *blueprint* sebagai bentuk percepatan terhadap kemajuan air dan sanitasi (United Nations 2023).

2.4. Upaya Pemerintah Dalam Menghadapi Krisis Air

Pada situasi krisis air yang melanda Negara Bagian Maharashtra, pemerintah pusat dan negara bagian melakukan upaya gabungan dalam merancang pembangunan Daerah Aliran Sungai (DAS), melalui program JSA yang berfokus pada konservasi air pada tahun 2019 (Studio18 2022).

Gambar 3. Program Jal Shakti Abhiyan



Sumber: (Vasvi Vanika 2022)

Program Jal Shakti Abhiyan (JSA) ini telah dilaksanakan dalam dua tahapan, pada tahapan pertama pada tanggal 1 Juli hingga 15 September 2019 dan tahapan kedua pada tanggal 1 Oktober hingga 30 November 2019. Selama periode ini berlangsung kurang lebih 1.592 blok di semua kabupaten telah di targetkan oleh pemerintah untuk membangun struktur terhadap pemanenan air hujan dan konservasi air dengan dana yang di keluarkan sekitar 2,73 lakh pada tahun 2019. Melalui program JSA, pemerintah juga melakukan perbaikan terhadap 45.000 badan yang berfokus pada permasalahan air. Pada tahun 2019 program JSA mencapai kesuksesan, sehingga pemerintah melakukan pengembangan terhadap

cakupan program dengan membuat Jal Shakti Abhiyan: Catch The Rain (JSA:CTR) yang mulai diterapkan pada 22 Maret hingga 30 November 2021. Skema terhadap program tambahan ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan solusi secara berkelanjutan dengan memastikan bahwa ketersediaan terhadap air dapat terpenuhi sepanjang tahun di negara pusat maupun negara bagian yang mengalami situasi kekeringan air (Studio18 2022).

Jal Shakti Abhiyan: Catch The Rain (JSA:CTR) telah menargetkan untuk fokus pada lima area intervensi, di antaranya mengenai pemanenan terhadap air hujan dan konservasi air, melakukan perbaikan terhadap badan yang memiliki fokus pada permasalahan air, memberikan pendanaan terhadap penanggulangan kembali geografis, melakukan pengembangan kembali DAS serta upaya pemerintah dalam melakukan penghijauan dengan tanaman intensif pada semua distrik yang ada di semua negara bagian India (Studio18 2022).

Gambar 4. 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sumber: (Maharashtra 2018)

1. Pada tahun 2015, *Sustainable Development Goals* (SDG's) telah diadopsi oleh PBB yang berisikan 17 Tujuan utama dan 169 Target yang ingin dicapai, yang mulai diberlakukan pada tahun 2016 (Maharashtra 2018).
2. Resolusi PBB telah ditandatangani oleh negara India dan telah berkomitmen untuk patuh terhadap implementasi SDG's (Maharashtra 2018).
3. Pada tahun 2015 hingga 2016, kurang lebih 6.202 desa di negara bagian Maharashtra terpilih dalam penerapan program unggulan pemerintah Jal Shakti Abhiyan (Maharashtra 2015).
4. Pada tahun 2016, Pemerintah negara bagian Maharashtra telah mendeklarasikan kebijakan mengenai Sistem Distribusi Pipa sebagai bentuk penguatan terhadap penggunaan air yang lebih efisien (Maharashtra 2015).
5. Otoritas Pengatur Sumber Daya Air yang berfokus pada pengaturan sumber daya air telah berhasil didirikan oleh negara bagian Maharashtra (Maharashtra 2015).
6. Pada tahun 2016, Pemerintah menyediakan 5.923 kapal tanker yang bermuatan air sekitar 10.000 liter dan setiap harinya akan diberikan kepada masyarakat pedesaan di negara bagian Maharashtra yang terkena dampak dari krisis air (P. Manoj 2019).
7. Pada tahun 2016, Pemerintah India telah menandatangani Perjanjian Paris sebagai bentuk upaya pembangunan berkelanjutan, sehingga pemerintah perlu melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat untuk menentukan strategi yang efektif dalam mengatasi krisis air (Chakraborty 2018).
8. Pada tahun 2019, Program unggulan pemerintah Jal Shakti Abhiyan telah diluncurkan yang berfokus pada konservasi air, pemanenan terhadap air

hujan dan pengisian ulang air tanah di sekitar 256 distrik yang berkaitan dengan pembangunan Daerah Aliran Sungai (Studio18 2022).

9. Pada tahun 2019, Pemerintah Maharashtra merilis Kebijakan Air Negara Maharashtra. Fokus kebijakan ini mengarah pada penggunaan air secara domestik, pengelolaan terhadap banjir, upaya mitigasi kekeringan dan industri. Kebijakan air ini juga mengatur mengenai kontrol terhadap penggunaan air pada sektor pertanian yang membutuhkan air lebih banyak seperti pisang dan tebu, lalu berusaha memperkenalkan pola tanaman yang lebih sedikit dalam penggunaan air. Pemerintah Maharashtra juga berencana untuk melakukan kerja sama dengan Lembaga Internasional untuk dapat mempelajari praktik secara global (Ajay Jadhav 2019).
10. Pada tahun 2020, Pemerintah negara bagian Maharashtra berupaya untuk bebas tangki air (Maharashtra 2015).
11. Pada tahun 2020 hingga 2021, Pemerintah menetapkan target 100% terhadap peningkatan populasi air minum yang dikelola dengan aman (Maharashtra 2018).
12. Pada tahun 2021, Program unggulan Jal Shakti Abhiyan dari pemerintah telah mencapai kesuksesan. Dalam hal ini pemerintah memperluas cakupan program Jal Shakti Abhiyan: Catch The Rain (JSA:CTR) dengan tujuan agar terciptanya solusi yang berkelanjutan dengan memastikan bahwa ketersediaan air dapat terpenuhi sepanjang tahun di negara bagian yang mengalami situasi kekurangan air (Studio18 2022).

BAB 3

PERAN PBB TERHADAP KRISIS AIR DI MAHARASHTRA

Pada Bab 3 akan membahas mengenai peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam melaksanakan program yang sejalan dengan Pemerintah Negara Bagian Maharashtra dalam mengatasi permasalahan air bersih dan sanitasi dengan menggunakan konsep Organisasi Internasional dan Implementasi di lingkup domestik. Pada bab ini juga akan membahas dan melakukan analisis lebih dalam terhadap peran PBB dalam mengatasi krisis air di Negara Bagian Maharashtra pada tahun 2016-2022. Berdasarkan konsep Organisasi Internasional dan Implementasi terdapat tiga pendekatan, penulis merasa bahwa peran United Nations sesuai dengan nilai-nilai dari pendekatan *managerial* yang berfokus pada pengelolaan dan *normative* yang didasarkan pada kepercayaan.

Pendekatan *managerial* adalah salah satu di antara ketiga pendekatan Organisasi Internasional dan Implementasi di lingkup domestik. Dalam pendekatan ini meyakini bahwa kepatuhan dalam perjanjian internasional dapat diwujudkan oleh interaksi yang terbentuk dari para aktor dengan tujuan yang sama dalam mencapai keuntungan dan keseimbangan. Sehingga pendekatan ini dapat dikatakan lebih terbuka dan mudah untuk dikelola yang memicu untuk terjalinnya kerja sama dengan aktor lain. Sedangkan pendekatan *normative* didasarkan pada kepercayaan negara-negara anggota melihat PBB sebagai aktor penting yang memiliki otoritas untuk membuat suatu negara patuh terhadap kesepakatan internasional yang telah disepakati (Jutta Joachim 2007).

3.1. Melakukan Pemantauan Melalui Kerja sama dengan Aktor Lain

Melalui pendekatan *managerial* terdapat upaya pemantauan yang dilakukan PBB sebagai organisasi internasional melalui lembaga yang berada dibawahnya, yaitu *United Nations Water* (UN-Water). Pada tahun 2015, kerja sama yang terjalin melalui *Integrated Monitoring Initiative for SDG 6* (IMI-SDG6) ternyata memberikan dukungan kepada negara anggota PBB dalam melakukan pemantauan terhadap isu terkait air bersih dan sanitasi. Tujuan utama dari IMI-SDG6 adalah untuk mempercepat pencapaian terhadap SDG poin 6 dengan melakukan peningkatan terhadap ketersediaan data dalam membuat kebijakan, perencanaan, peraturan dan investasi. India dan Negara Bagian Maharashtra yang tergabung di dalam PBB tentu saja memiliki kewajiban untuk membuat laporan terkait kemajuan SDG poin 6 sebagai tolak ukur yang akan digunakan PBB dalam melihat perkembangan dari pembangunan berkelanjutan. Melalui laporan *Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking-Water* (GLAAS) dapat dilihat negara anggota yang sudah berada di jalur yang tepat dalam mencapai target ketersediaan air di negaranya. Seluruh laporan yang diterima oleh IMI-SDG6 nantinya akan kumpulkan dalam Portal Data SDG 6 dan diurutkan berdasarkan negara dan wilayahnya (IISD 2023).

IMI-SDG6 memiliki komitmen untuk bekerja sama dengan seluruh negara anggota yang tergabung di dalam PBB termasuk India dan Negara Bagian Maharashtra, untuk memastikan pada tahun 2030 mendatang data SDG poin 6 tersedia dan dapat di akses oleh semua negara. IMI-SDG6 juga memberikan dasar bukti yang konkrit terhadap pelaksanaan konferensi air PBB pada tahun 2023 dan akan ditinjau lebih dalam terkait SDG poin 6, berdasarkan *High-Level Political*

Forum (HLPF) yang merupakan pembaruan rutin yang dilakukan IMI-SDG6 sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada negara anggota dalam memberikan laporan kemajuan pembangunan berkelanjutan yang tercantum dalam Portal Data SDG poin 6 (IISD 2023).

Pada tahun 2015, UN-Water menetapkan bahwa IMI-SDG6 akan menjadi agenda awal terhadap pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 mendatang. Tentunya dengan menjalin kerja sama dengan organisasi dibawah PBB yang dijadikan sebagai indikator terhadap SDG poin 6. IMI-SDG6 juga mendorong kerja sama antar sektoral dengan seluruh organisasi di antaranya:

Table 3. Kerja sama Sektoral IMI-SDG6

Organisasi	Keterangan
Joint Monitoring Programme (JMP)	adalah program pemantauan bersama yang berfokus pada pasokan air, sanitasi dan kebersihan, mengacu pada indikator SDG 6.1 dan 6.2
United Nations Statistics Division (UNSD)	adalah Divisi Statistik PBB yang melihat perkembangan setiap negara dalam mencapai target SDG poin 6.
Global Environment Monitoring System for Water (GEMS)	adalah bentuk sistem pemantauan pada sektor lingkungan global yang berfokus pada air.
Integrated Water Resources Management (IWRM)	adalah bentuk laporan tahunan yang diberikan setiap negara anggota yang tergabung di dalam PBB untuk melihat perkembangan status terhadap pengelolaan sumber daya air terpadu, mengacu pada indikator SDG 6.5.1
Report under the Water Convention	Berisikan mengenai laporan yang dilihat berdasarkan konvensi air tahunan, mengacu pada indikator SDG 6.5.2
Freshwater Ecosystems Explorer	Setiap negara anggota boleh melakukan penjelajahan terhadap ekosistem air tawar.
Global Analysis and Assesment of Sanitation and Drinking-Water (GLAAS)	adalah upaya analisis yang dilakukan oleh PBB dalam menilai sanitasi dan air minum negara anggota, berdasarkan laporan yang diberikan, mengacu pada indikator SDG 6a dan 6b.

Sumber: (United Nations n.d.)

Mengenai kerja sama sektoral yang dibangun oleh IMI-SDG6 ini, merupakan tanggung jawab bagi pemerintah negara anggota yang tergabung di dalam PBB termasuk India dan Negara Bagian Maharashtra tanpa terkecuali memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara anggota lainnya dalam berikan laporan dan pertanggung jawaban sebagai evaluasi kemajuan dan perkembangan pembangunan berkelanjutan poin 6 (United Nations n.d.). PBB sebagai organisasi internasional juga telah mempersiapkan agenda pelaksanaan apa yang akan dilakukan selain pemantaun terhadap SDG poin 6 diantaranya:

Table 4. Pelaksanaan Agenda PBB

Tahun	Pelaksanaan
2015	Perencanaan terhadap agenda 2030 mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berfokus pada air dan sanitasi. Hal ini telah di adopsi oleh Majelis Umum dari PBB dengan melibatkan berbagai Anggota dan Mitra.
2015	Melakukan pemantauan terintegrasi terkait SGD 6 sebagai tujuan untuk dapat memberikan laporan kemajuan dan perkembangan terkait air dan sanitasi secara terkoordinasi dan koheren, berdasarkan diskusi yang telah dilakukan Anggota dan Mitra.
2018	Melakukan perencanaan Dekade Aksi Air tahun 2018-2028 sebagai bentuk pendorong dari program yang berkaitan dengan air serta tolak ukur tercapainya agenda 2030.
2018	Membuat Laporan Sintesis SDG 6 yang dihasilkan oleh PBB untuk pertama kalinya membahas mengenai air dan sanitasi, dengan menyajikan status secara global SDG 6 guna mencapai target terkait permasalahan air dan melakukan eksplorasi terhadap keterkaitan SDG 6 terkait agenda 2030 dengan cakupan yang lebih luas.
2019	Portal Data SDG 6 yang merupakan program kerja yang diluncurkan oleh PBB, guna menyatukan semua data maupun indikator global SDG 6 dengan parameter utama yang ada di dalamnya, serta melakukan pelacakan terhadap kemajuan yang terjadi pada portal tersebut secara keseluruhan.
2020	Ruang Aksi SDG 6 & Kerangka Akselerasi Global SDG 6 telah diluncurkan oleh UN-Water. Ruang Aksi adalah bentuk mobilisasi, inisiatif dan menginspirasi dalam upaya mendorong orang-orang untuk bergerak maju menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Sedangkan Kerangka Akselerasi merupakan percepatan global mengenai air bersih dan sanitasi dengan skala besar.

Sumber: (United Nations 2023).

3.2 Pengembangan Kapasitas, Bantuan Teknis, dan Keuangan

Dalam mencapai pembangunan berkelanjutan poin 6, dengan bantuan yang diberikan oleh badan-badan dibawah PBB, negara anggota, sektor swasta, LSM dalam melakukan pengembangan terhadap kapasitas, teknis dan bantuan keuangan yang digunakan dalam pencapaian ketersediaan air bersih dan sanitasi, diantaranya melalui bantuan:

1. Pemerintah Amerika Serikat, memberikan bantuan keuangan sebesar \$49 miliar untuk mendukung PBB dalam melakukan pengembangan terhadap infrastruktur terkait air bersih dan sanitasi yang tahan terhadap perubahan iklim (United Nations 2023).
2. Pemerintah Jepang, memberikan bantuan keuangan sebesar 500 miliar yen (\$3,65 miliar) yang dapat digunakan untuk melakukan pengembangan terhadap infrastruktur yang berkualitas, serta memberikan solusi terhadap permasalahan sosial yang terjadi terkait air bersih di kawasan Asia-Pasifik (United Nations 2023).
3. Pemerintah Vietnam, telah berkomitmen untuk membantu dalam melakukan pengembangan kapasitas terhadap kebijakan pengelolaan wilayah sungai pada tahun 2025 dan memastikan bahwa semua rumah tangga memiliki akses terhadap air bersih (United Nations 2023).
4. Pemerintah Swiss, telah berkomitmen dan berkontribusi dalam menjalin kerja sama lintas batas terkait Konvensi Air (United Nations 2023).
5. Pemerintah Mozambik, memberikan bantuan keuangan sebesar \$9,5 miliar yang akan digunakan untuk mempercepat tujuan pembangunan berkelanjutan poin 6 pada tahun 2030 (United Nations 2023).

6. Pada tahun 2030, UE memiliki tujuan untuk mendukung akses 70 juta orang terhadap sumber air minum dengan menyediakan fasilitas sanitasi yang lebih baik, dengan memberikan bantuan keuangan \$20 juta dalam upaya pengawasan terhadap penerapan air limbah (United Nations 2023).
7. *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), memberikan bantuan keuangan setiap tahun \$30 juta untuk digunakan untuk anggaran kegiatan air bersih dan sanitasi (UNESCO n.d.).
8. *United Nations Environment Programme* (UNEP), memberikan anggaran keuangan \$100-500 juta setiap tahun untuk membantu dalam menangani permasalahan air bersih dan sanitasi (UNEP n.d.).
9. *Food and Agriculture Organization* (FAO), memberikan bantuan keuangan setiap tahun \$20-30 juta untuk kegiatan air bersih dan sanitasi (FAO n.d.).
10. *World Meteorological Organization* (WMO), memberikan bantuan keuangan \$10-20 juta untuk kegiatan air bersih dan sanitasi (WMO n.d.).
11. *World Health Organization* (WHO), menyediakan anggaran keuangan setiap tahun \$20-30 juta untuk mengatasi permasalahan air dan sanitasi serta membantu menyediakan layanan dan fasilitas kesehatan (WHO 2023).
12. UN Global Compact, memberikan bantuan kapasitas dan keuangan \$1-10 juta, melakukan pengembangan sumber daya air melalui aksi WASH4Work untuk menerapkan bentuk pengelolaan air bersih dan sanitasi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan 6 (UN Global Compact n.d.).
13. *Joint Monitoring Programme* (JMP), memberikan bantuan keuangan setiap tahunnya sebesar \$3-4 juta yang digunakan untuk pemantauan terhadap perkembangan air dan sanitasi di berbagai negara anggota PBB (JMP 2023).

14. *Niger Basin Authority* (NBA), Kementrian Federal Jerman, Konservasi Alam, Keselamatan Nuklir dan Perlindungan Konsumen telah membuat komitmen untuk turut berkontribusi dengan memberikan \$21,2 juta untuk memperkuat proyek NBA dan lembaga-lembaganya termasuk negara anggota dalam menangani permasalahan air bersih dan sanitasi (United Nations 2023).
15. Melalui *Africa Investment Programme* (AIP), memberikan bantuan keuangan sebesar \$30 miliar untuk membantu mengatasi permasalahan air bersih dan sanitasi terutama di negara afrika dan negara anggota lainnya (United Nations 2023).
16. Bank Pembangunan Asia, memberikan bantuan keuangan sebesar \$11 miliar untuk mengatasi permasalahan air di kawasan Asia-Pasifik dan \$100 miliar yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan air secara global hingga tahun 2030 (United Nations 2023).
17. World Benchmarking Alliance, melakukan obesrvasi dan penilaian terhadap 1.000 perusahaan secara global setiap 2 tahun sekali yang berfokus pada pencapaian terkait air bersih dan sanitasi.
18. Starbucks, Ecolab, Gap Inc, Reckitt dan DuPont melakukan kerja sama dengan Pemerintah Amerika Serikat dengan melakukan investasi sebesar \$140 juta yang dapat digunakan untuk dana akses terhadap air dengan tujuan pemenuhan terhadap akses air, sanitasi dan kebersihan (United Nations 2023).

19. DANONE, memberikan bantuan keuangan setiap harinya sebesar \$30 juta untuk mengatasi permasalahan terhadap akses air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan (United Nations 2023).
20. Xylem, merupakan perusahaan swasta yang memberikan bantuan sebesar \$11 miliar yang bisa digunakan untuk melakukan pengembangan dan penelitian terkait kemajuan air bersih dan sanitasi (United Nations 2023).
21. World Vision, ikut berkontribusi dengan melakukan investasi sebesar \$2 miliar yang digunakan untuk memperluas layanan kerja terkait transformatif *Water, Sanitation, Hygiene (WASH)* yang sudah dilakukan di 50 negara dan 6 wilayah, salah satunya India dan Negara Bagian Maharashtra (United Nations 2023).
22. Water.org, memberikan bantuan secara teknis dan keuangan \$10-20 juta dengan mempromosikan WaterCredit yang bisa digunakan oleh lembaga keuangan lokal dalam meningkatkan pinjaman terhadap anggaran air bersih dan sanitasi (Water.org n.d.).

Berdasarkan bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, baik berupa kapasitas, teknis maupun keuangan kepada PBB sebagai organisasi internasional yang secara aktif ikut membantu negara dalam mencapai *Sustainable Development Goal 6 (SDG 6)*. Seluruh dana yang didapatkan dari berbagai pihak ini akan dialokasikan untuk melakukan pengembangan dan pembangunan infrastruktur, menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat yang lebih memadai, memenuhi kebutuhan pangan & pertanian yang terkena dampak dari krisis air yang berkepanjangan, pengelolaan terhadap ketersediaan air bersih dan sanitasi, serta melakukan penanaman kembali daerah hijau (United Nations 2023).

3.3 Otoritas dan Legitimasi

Melalui pendekatan *normative* yang didasarkan pada rasa kepercayaan. PBB sebagai organisasi internasional mendapatkan kepercayaan dari negara-negara anggota sebagai aktor penting yang memiliki otoritas untuk membuat Pemerintah India dan Negara Bagian Maharashtra patuh terhadap kesepakatan internasional yang telah disepakati (Jutta Joachim 2007). PBB memposisikan diri sebagai Organisasi Internasional, dalam upaya penerapan perjanjian internasional yang sudah disepakati oleh India melalui: Perjanjian Paris pada tahun 2015 dalam kerangka konvensi PBB yang berkaitan dengan Perubahan Iklim, Agenda Aksi yang diselenggarakan Addis Ababa pada tahun 2015 mengenai Pembiayaan Pembangunan, Kerangka Kerja Sendai pada tahun 2015 hingga 2030 dalam upaya Mengurangi Resiko terjadinya Bencana dan Agenda pada tahun 2030 mengenai Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan dari *Sustainable Development Goals 6* (SDG's 6) memastikan bahwa ketersediaan terhadap air bersih dan sanitasi akan terus berkembang dan dirasakan oleh masyarakat di masing-masing negara, sehingga dalam hal ini SDG 6 di berbagai aspek dapat memperhitungkan bagaimana tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan krisis air dan sanitasi yang terjadi di Negara Bagian Maharashtra (United Nations 2023).

Selain itu PBB juga melakukan inisiatif terhadap pemantauan yang terkoordinasi dan terintegrasi dalam mencapai SDG 6, melalui laporan kemajuan dan perkembangan mengenai air dan sanitasi. Pada tahun 2018, PBB meluncurkan program yang berhubungan dengan pelaksanaan Agenda 2030, mengenai Dekade Aksi Air yang akan berlangsung pada tahun 2018 hingga 2028 yang akan digunakan sebagai tolak ukur dalam pembangunan berkelanjutan. Di tahun yang sama PBB

meluncurkan Laporan Sintesis SDG 6 dengan cakupan yang lebih luas dan melakukan eksplorasi dalam mengatasi permasalahan air dan sanitasi. Lalu pada tahun 2019, PBB melalui program kerja Portal Data SDG 6 yang menjanjikan ini memiliki tujuan untuk menyatukan seluruh data dan indikator SDG 6 secara global, serta melakukan pelacakan berkala terkait kemajuan yang terjadi pada perkembangan portal tersebut secara keseluruhan. PBB pada akhirnya akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas serta dukungan dalam mencapai kesepakatan internasional mengenai air dan sanitasi (United Nations 2023).

PBB juga meminta kepada negara anggota, termasuk India dan Negara Bagian Maharashtra untuk membuat dan memberikan laporan tahunan terkait Pembangunan Air PBB. Laporan ini sudah diberlakukan sejak tahun 2015 hingga 2023 dengan menyajikan tema yang berbeda-beda. Melalui *World Water Development Report* (WWRD) di dalamnya berisikan tentang praktik dan analisis dalam mengimplementasikan gagasan dan tindakan terhadap air dan sanitasi.

Table 5. Laporan Pembangunan Air PBB

Tahun	Tema Laporan
2015	Air untuk Dunia yang Berkelanjutan.
2016	Air dan Pekerjaan.
2017	Limbah Sumber Daya yang belum dimanfaatkan.
2018	Solusi Berbasis Alam untuk Air.
2019	Tidak Meninggalkan Siapapun.
2020	Air dan Perubahan Iklim.
2021	Menghargai Air.
2022	Air Tanah membuat tidak terlihat menjadi terlihat.
2023	Kemitraan dan Kerja sama untuk Air.

Sumber: (United Nations 2023)

Mengenai laporan terhadap pembangunan air ini telah melibatkan *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) sebagai badan yang berada dibawah PBB dalam membantu menerbitkan sebuah program yang bertujuan untuk memenuhi bebragai informasi dan kebijakan yang relevan dan mudah diterapkan bagi negara-negara anggota PBB yang dikenal dengan *World Water Assessment Programme* (WWAP) yang sudah berdiri sejak tahun 2000. PBB memiliki asumsi bahwa dengan adanya tambahan program dari UNESCO ini, dapat dijadikan negara anggota dalam melakukan pengembangan dan pengelolaan terhadap sumber daya air bersih dan sanitasi demi mencapai pembangunan berkelanjutan poin 6. PBB memberikan tanggung jawab kepada India dan Negara Bagian Maharashtra sebagai salah satu negara anggota untuk bisa patuh terhadap perjanjian yang telah disepakati dan memberikan laporan tahunan mengenai air dan sanitasi sebagai bentuk keseriusan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan poin 6. Melalui adanya laporan pembangunan air dunia ini, membuat negara anggota dapat membuat dan menentukan kebijakan pada tingkatan yang lebih baik (UNESCO n.d.).

3.4 Kontrol terhadap Informasi

Permasalahan ekstrim terhadap diskriminasi terkait sistem kasta dan kekerasan perempuan yang sering terjadi di daerah pemukiman (dalit). India dan Negara Bagian Maharashtra harus dihadapkan dengan kondisi tersebut yang diimbangi dengan permasalahan krisis air dan sanitasi yang berkepanjangan sehingga membuat permasalahan ini menjadi begitu kompleks. Dampak yang

dihasilkan dari permasalahan diskriminasi kasta dan kekerasan terhadap perempuan ini memberikan tekanan lingkungan untuk sesama masyarakat di lingkungan pedesaan. Masyarakat dengan kasta yang rendah akan lebih mudah di intimidasi oleh masyarakat yang memiliki kasta lebih tinggi demi memenuhi kebutuhan ketersediaan air bersih dan sanitasi. Peran perempuan begitu dominan dalam pemenuhan terhadap ketersediaan air bersih rumah tangga dengan mengumpulkan air dari lubang-lubang dari dasar sungai, namun tidak menutup kemungkinan bahwa sering kali ditemukan perempuan di masyarakat pemukiman mendapatkan siksaan, kekerasan dan pelecehan seksual demi mendapatkan air bersih (Anuj Ghanekar 2019).

India dan Negara Bagian Maharashtra telah membuat berbagai peraturan dan undang-undang yang telah diratifikasi di dalam perjanjian internasional dengan memastikan perlindungan pemenuhan terhadap hak asasi perempuan, namun peraturan yang telah dibuat tidak begitu bisa diimplementasikan dalam permasalahan ini, sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang bagi Pemerintah India dan Pemerintah Negara Bagian Maharashtra untuk bisa mengakui bahwa urgensi terhadap permasalahan kasta dan kekerasan perempuan ini memiliki dampak yang begitu besar bagi masyarakat pedesaan. Terkait permasalahan isu ekstrim terhadap permasalahan sistem kasta dan kekerasan pada perempuan, PBB melakukan *main streaming* dalam membantu Pemerintah India dan Pemerintah Negara Bagian Maharashtra dalam memberikan pemahaman yang lebih baik dalam mengatasi permasalahan tersebut, walaupun diketahui bahwa upaya yang dilakukan PBB sebagai organisasi internasional dalam berkontribusi dalam isu ekstrim

mengenai sistem kasta dan kekerasan pada perempuan terutama bagi masyarakat dalit (pemukiman) masih sangat minim (CNN Indonesia 2014).

Berdasarkan laporan khusus dari PBB melihat bahwa faktor utama dari kekerasan seksual yang terjadi di India dan Negara Bagian Maharashtra didasarkan pada budaya patriarki yang didukung oleh seluruh penegak keadilan. Sehingga dengan adanya permasalahan ekstrim ini memperlihatkan bahwa Pemerintah India dan Pemerintah Negara Bagian Maharashtra tidak mampu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pemukiman dipedesaan. Dalam mengatasi hal tersebut PBB membentuk sebuah gerakan *Dalit Women's Livelihoods Accountability Initiative* (DWLAI) yang secara langsung bekerja sama dengan perempuan dalit dari kasta yang mengalami diskriminasi, untuk mendapatkan hak mereka sebagai perempuan. Jika dilihat dari tahun 2015 hingga 2016 kekerasan dan diskriminasi terhadap kasta ini mencapai 27,9% dan dengan seiring berjalannya waktu pada tahun 2020 tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap kasta mengalami penurunan sebesar 16,79% (Gurnita 2022). Dampak positif terhadap isu ekstrim yang terjadi terhadap perempuan dan diskriminasi sistem kasta ini akhirnya meningkatkan kesadaran Pemerintah India dan Negara Bagian Maharashtra dalam memahami lebih dalam untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan lebih baik.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Air memiliki peran yang penting terhadap pembangunan berkelanjutan, hal ini berkaitan dengan upaya pemenuhan atas hak masyarakat mengenai ketersediaan air bersih. Pada tahun 2016, Pemerintah Negara Bagian Maharashtra harus dihadapkan dengan situasi kekeringan air yang berkepanjangan, hal ini disebabkan oleh sistem pengelolaan air yang salah oleh pemerintah, pemilihan tanaman produksi, Fenomena El Nino dan monsun yang lemah. Pemerintah Negara Bagian Maharashtra merasa bahwa krisis air yang terjadi dapat diselesaikan dengan beberapa tahapan, di antaranya: konservasi air, pengikisan air tanah dan pemanenan air hujan, lalu dilakukannya perbaikan infrastruktur dan pengisian ulang air pada tempat-tempat yang mengalami kekeringan seperti kolam, danau, tangka air maupun lahan basah. Dalam menghadapi permasalahan krisis air, Pemerintah Negara Bagian Maharashtra perlu melakukan *Sustainable Development Goals* (SDG's) terhadap air bersih dan sanitasi. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan akses dalam pemenuhan terhadap ketersediaan air bersih.

Berdasarkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Negara Bagian Maharashtra dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDG's) terkait air bersih dan sanitasi. Hal tersebut ternyata berkaitan dengan peran dan tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB merupakan satu kesatuan dalam membantu menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh setiap negara anggota yang tergabung di dalamnya, fokus utama PBB dalam hal ini tentunya memberikan dukungan secara langsung melalui tiga tahapan di antaranya: PBB

memberikan informasi terkait proses kebijakan dalam mengatasi permasalahan air dan sanitasi, PBB memberikan dukungan dengan melakukan pemantauan dan membuat laporan tahunan yang bermanfaat bagi negara yang tergabung, PBB juga melakukan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan yang dapat menginspirasi setiap bentuk pemerintah dalam mengambil keputusan.

PBB juga melakukan inisiatif terhadap pemantauan yang terkoordinasi dan terintegrasi dalam mencapai SDG 6, melalui laporan kemajuan dan perkembangan mengenai air dan sanitasi. Pada tahun 2018, PBB meluncurkan program yang berhubungan dengan pelaksanaan Agenda 2030, mengenai Dekade Aksi Air yang akan berlangsung pada tahun 2018 hingga 2028 yang akan digunakan sebagai tolak ukur dalam pembangunan berkelanjutan. Di tahun yang sama PBB meluncurkan Laporan Sintesis SDG 6 dengan cakupan yang lebih luas dan melakukan eksplorasi dalam mengatasi permasalahan air dan sanitasi. Lalu pada tahun 2019, PBB melalui program kerja Portal Data SDG 6 yang menjanjikan ini memiliki tujuan untuk menyatukan seluruh data dan indikator SDG 6 secara global, serta melakukan pelacakan berkala terkait kemajuan yang terjadi pada perkembangan portal tersebut secara keseluruhan. PBB pada akhirnya akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas serta dukungan dalam mencapai kesepakatan internasional mengenai air dan sanitasi.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan Managerial Approach dan Normative Approach untuk melihat peran PBB dalam mengatasi krisis air di Negara Bagian Maharashtra. Program yang dilaksanakan oleh PBB cenderung memiliki sifat terbuka dan lebih menekankan pada bentuk kerja sama dengan lembaga yang berada dibawahnya. Pertama, implementasi terhadap program yang

ingin dilakukan melalui pendekatan *Managerial Approach* ini menekankan pada pemecahan masalah, pengembangan kapasitas negara, melakukan pemantauan dan intrepetasi terhadap peraturan yang harus dipatuhi. Pendekatan ini meyakini bahwa aktor-aktor luar seperti PBB hingga lembaga dibawahnya yang berperan penting dalam mengimplementasikan perjanjian internasional. Organisasi internasional juga memberikan bantuan teknis dalam membangun kapasitas sumber daya manusia yang ada, serta bantuan keuangan kepada negara anggota. Kedua, implementasi terhadap program yang ingin dilakukan melalui pendekatan *Normative Approach*. Pendekatan normatif sering disangkut-pautkan dengan pendekatan konstruktivis, sehingga dalam hal ini organisasi internasional mendapatkan kepercayaan dari negara-negara anggota sebagai aktor penting yang memiliki otoritas untuk membuat suatu negara patuh terhadap kesepakatan internasional yang telah disepakati.

<i>No</i>	<i>Indikator</i>	<i>Implementasi</i>
1.	Managerial Approach	<p>Pemantuan melalui Kerja sama dengan Aktor Lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pada tahun 2015, melalui IMI-SDG6 untuk mempercepat pencapaian terhadap SDG poin 6. b) <i>Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking-Water</i> (GLAAS) merupakan sebuah laporan yang memperlihatkan apakah negara berada pada jalur yang tepat dalam mencapai target ketersediaan air di negaranya. c) IMI-SDG6 menyediakan Portal Data SDG 6 yang bisa digunakan oleh seluruh negara anggota PBB dalam mengakses informasi terkait laporan yang berkaitan dengan air bersih dan sanitasi. d) <i>High-Level Political Forum</i> (HLPF) yang merupakan pembaruan rutin yang dilakukan IMI-SDG6 sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada negara anggota dalam memberikan laporan kemajuan pembangunan berkelanjutan yang tercantum dalam Portal Data SDG poin 6. e) IMI-SDG6 menjalin kerja sama sektoral untuk memperkuat pemantauan terhadap perkembangan ketersediaan air bersih dan sanitasi, diantaranya:

		<p>JMP, UNSD, GEMS, IWRM, Report under the Water Convention, Freshwater Ecosystems Explorer dan GLAAS yang mengacu pada pencapaian kemajuan SDG 6.</p>
		<p>Pengembangan Kapasitas, Bantuan Teknis, dan Keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Amerika Serikat setiap tahunnya memberikan bantuan keuangan \$49 miliar dalam melakukan pengembangan infrastruktur air bersih dan sanitasi yang tahan terhadap perubahan iklim. b) Jepang setiap tahunnya memberikan bantuan keuangan \$3,65 miliar dalam membangun infrastruktur yang berkualitas, terutama di kawasan Asia-Pasifik. c) Mozambik setiap dua tahun sekali memberikan bantuan keuangan \$9,5 miliar dalam mencapai percepatan SDG poin 6. d) Pada tahun 2023, Vietnam telah berkomitmen untuk membantu PBB dalam melakukan pengembangan kapasitas terhadap kebijakan pengelolaan wilayah sungai yang ditargetkan akan terlaksana pada tahun 2025. e) Pada tahun 2023, Swiss telah berkomitmen dan berkontribusi untuk membantu dalam menjalin kerja sama lintas batas terkait Konvensi Air. f) Pada tahun 2030 mendatang, UE telah memiliki komitmen untuk memberikan dukungan akses terhadap 70 juta orang dalam menyediakan fasilitas sanitasi air minum yang baik dan memberikan bantuan keuangan setiap tahunnya \$20 juta dalam upaya pengawasan terhadap penerapan air limbah yang aman. g) Dana campuran yang berasal dari UNESCO, UNEP, FAO, WMO dan WHO memberikan bantuan keuangan setiap tahunnya \$214 juta dalam membantu mengatasi permasalahan air bersih dan sanitasi bagi negara anggota yang sedang berada pada situasi tersebut. h) Bank Pembangunan Asia setiap tahunnya memberikan bantuan keuangan \$11 miliar untuk mengatasi permasalahan air di kawasan Asia-Pasifik dan \$100 miliar yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan air secara global yang dapat digunakan hingga tahun 2030 mendatang. i) World Benchmarking Alliance setiap dua tahun sekali melakukan observasi dan penilaian terhadap

		1.000 perusahaan yang berfokus dalam mencapai keterkaitan air bersih dan sanitasi.
2.	Normative Approach	<p>Otoritas dan Legitimasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) PBB memiliki otoritas power dalam membuat Pemerintah India dan Negara Bagian Maharashtra untuk patuh terhadap perjanjian yang telah disepakati, diantaranya: Perjanjian Paris pada tahun 2015 dalam kerangka konvensi PBB yang berkaitan dengan Perubahan Iklim, Agenda Aksi yang diselenggarakan Addis Ababa pada tahun 2015 mengenai Pembiayaan Pembangunan, Kerangka Kerja Sendai pada tahun 2015 hingga 2030 dalam upaya Mengurangi Resiko terjadinya Bencana dan Agenda pada tahun 2030 mengenai Pembangunan Berkelanjutan. b) PBB meminta kepada India dan Negara Bagian Maharashtra untuk membuat laporan tahunan terkait Pembangunan Air PBB yang sudah berlangsung sejak tahun 2015 hingga 2023, melalui <i>World Water Development Report (WWRD)</i> di dalamnya berisikan tentang praktik dan analisis dalam mengimplementasikan gagasan dan tindakan terhadap air dan sanitasi. c) PBB memberikan tanggung jawab kepada India dan Negara Bagian Maharashtra sebagai salah satu negara anggota untuk bisa patuh terhadap perjanjian yang telah disepakati dan memberikan laporan tahunan mengenai air dan sanitasi sebagai bentuk keseriusan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan poin 6. <p>Kontrol terhadap Informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) PBB melakukan <i>main streaming</i> dalam mengatasi isu ekstrim terkait diskriminasi kasta dan kekerasan perempuan yang diperkuat dengan permasalahan krisis air yang berkepanjangan. b) Laporan khusus PBB melihat bahwa faktor utama dari kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dalit didasarkan pada budaya patriarki. c) PBB membentuk gerakan <i>Dalit Women's Livelihoods Accountability Initiative (DWLAI)</i> yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dalit dalam mendapatkan hak dan keamanan. d) Pada tahun 2015 hingga 2016 kekerasan dan diskriminasi terhadap kasta mencapai 27,9% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 mencapai 16,79%.

		e) Hal ini menyadarkan Pemerintah India dan Negara Bagian Maahrashtra untuk dapat memahami lebih dalam untuk menyelesaikan permasalahan diskriminasi kasta dan kekerasan perempuan dengan menerapkan bentuk kebijakan yang tegas bagi para pelaku.
--	--	--

4.2 Rekomendasi

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini berdasarkan argumentasi melalui data yang telah ditemukan, diharapkan untuk mampu mendorong adanya penelitian selanjutnya dengan melengkapi kekurangan yang ada di dalam penelitian ini. Penulis dapat merekomendasikan penelitian lanjutan diantaranya:

1. Strategi masyarakat Negara Bagian Maharashtra untuk dapat bertahan dalam menghadapi situasi krisis air.
2. Dampak krisis air dari sudut pandang Ekonomi, Politik, Kesehatan dan Pangan.
3. Bagaimana Pemerintah Negara Bagian Maharashtra dapat melakukan peningkatan terhadap perannya dalam menangani krisis air dengan cara mengetahui akses terhadap daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh Organisasi Internasional.
4. Keberhasilan Organisasi Internasional yang bergerak di bidang air dapat mengakhiri krisis air mencapai titik nol kekeringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajay Jadhav. 2019. *In Year of Drought and Flood, Maharashtra Govt Comes up with Policy to Mitigate Crises, Save Water*. 6 September. <https://indianexpress.com/article/india/maharashtra-govt-comes-up-with-policy-to-mitigate-crises-save-water-5970745/>.
- Anjali Marar. 2018. *3.000 Villages in Maharashtra may face Acute Drinking Water Shortage by Year-end*. 7 Novmeber. <https://indianexpress.com/article/india/3000-villages-in-maharashtra-may-face-acute-drinking-water-shortage-by-year-end-5436651/>.
- Anuj Ghanekar. 2019. *Dalits Face Torture, Their Drinking Water Contaimaned with Shit in Parts of Maharashtra*. 7 November. <https://www.youthkiwaaz.com/2019/11/how-caste-shapes-the-water-crisis-in-maharashtra/>.
- Byjus. 2023. *National Institution for Transforming India (NITI Aayog) - A Brief Overview*. 19 Juli. <https://byjus.com/free-ias-prep/niti-aayog/>.
- Chakraborty, Vaibhav. 2018. *Water Crisis in Maharashtra and Rajasthan*. 21 Maret. <https://www.mapsofindia.com/my-india/india/water-crisis-in-maharashtra-and-rajasthan>.
- CNN Indonesia. 2014. *Budaya Kasta di India, Budaya Pemerksosaan*. 8 September. Accessed Agustus 3, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20140908170917-113-2763/budaya-kasta-di-india-budaya-pemerksosaan>.
- Dnyanoba Gutte. 2022. *Water Scarcity in Maharashtra*. 18 Januari. <https://youronlinedictionary.com/water-scarcity-in-maharashtra/>.
- Dongray, Amruta. 2016. *The Real Reasons Behind Maharashtra's Man-Made Drought*. 30 April. <https://yourstory.com/2016/04/maharashtra-drought-feature/amp>.
- FAO. n.d. *Food and Agriculture Organization (FAO)*. Accessed September 29, 2023. <https://www.unwater.org/about-un-water/members-and-partners/food-and-agriculture-organization-united-nations-fao>.
- Firstpost. 2015. *Water Crisis: Men in Drought-prone Maharashtra Village are Marrying 'Water-Wives'*. 5 Juni. <https://www.firstpost.com/living/water-crisis-men-in-drought-prone-maharashtra-village-are-marrying-water-wives-2281714.html>.
- Govind Katalakute, Vasant Wagh, Dipak Panaskar, Shrikant Mutake. 2016. "Impact of Drought on Environmental, Agricultural and Socio-Economic Status in Maharashtra State, India." *Natural Resources and Conservation* 36-40.
- GSDA. 2023. *About Groundwater Surveys and Development Agency*. 15 Februari. <https://gsda.maharashtra.gov.in/>.
- Gurnita, I GedePutu Wahyu. 2022. *Apakah UN Women memiliki dampak bagi Perempuan Dalit di India*. 9 Desember. Accessed Agustus 3, 2023. <https://kumparan.com/igedeputuwahyugurnita/apakah-un-women-memiliki-dampak-bagi-perempuan-dalit-di-india-1zPBXBn2W5O/3>.
- IISD. 2023. *SDG 6 Data for all*. 22 Maret. Accessed September 29, 2023. <https://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/sdg-6-data-for->

- all/#:~:text=In%202018%2C%20UN%2DWater%20concluded,achieve%20SDG%206%20by%202030.
- India Today. 2016. *Drought Declared in 29.000 Villages in Maharashtra: Facts on Maharashtra Drought*. 13 Mei. <https://www.indiatoday.in/education-today/gk-current-affairs/story/maharashtra-drought-323364-2016-05-13>.
- India, Government of. 2023. *Departmental History*. 15 Februari. <https://wrd.maharashtra.gov.in/Site/1127/Departmental-History>.
- Irawan, Bambang. 2006. "Fenomena Anomali Iklim El Ninodan La Nina: Kecenderungan Jangka Panjang dan Pengaruhnya Terhadap Produksi Pangan." *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 28-44.
- James L. Wescoat Jr., Jonnalagadda V.R. Murty. 2021. "District Drinking Water Planning for Sustainability in Maharashtra: Between Local and Global Scales." *MDPI* 1-21.
- JMP. 2023. *About the JMP*. 18 Juli. <https://washdata.org/how-we-work/about-jmp>.
- . 2023. *Drinking Water*. 18 Juli. <https://washdata.org/monitoring/drinking-water>.
- Jutta Joachim, Bob Reinalda, Bertjan Verbeek. 2007. *International Organizations and Implementation: Enforcers, Managers, Authorities?* New York: Roudletge.
- Kemlu. 2023. *Country Profile India*. 15 Februari. <https://kemlu.go.id/newdelhi/en/read/country-profile-india/2228/etc-menu>.
- Kumar, Laxmi Mohan. 2023. *Drought-Ridden Food Bowl! Know How Water Scarcity Impacts Thousands of Farmers in Maharashtra*. 4 Maret. <https://thelogicalindian.com/environment/water-scarcity-impacts-thousands-of-farmers-in-maharashtra-40462>.
- Maharashtra. 2023. *Maharashtra State Legal Services Authority*. 25 Juni. <https://legalservices.maharashtra.gov.in/>.
- Maharashtra. 2018. *Progress of Sustainable Development Goals in Maharashtra*. Government of Maharashtra: Directorate of Economics and Statistics Planning Department.
- Maharashtra. 2015. *Vision 2030*. Maharashtra: Planning Departement Government of Maharashtra.
- MJP. 2023. *About Maharashtra Jeevan Pradhikaran*. 15 Februari. <https://mjp.maharashtra.gov.in/>.
- MWRA. 2023. *About Maharashtra Water Resources Regulation Authority*. 15 Februari. <https://mwra.maharashtra.gov.in/en/about-maharashtra-water-resources-regulation-authority-mwra/>.
- NITI Aayog. 2018. *Indeks SDG: Status Maharashtra*. India Index Report, India: India Index Report.
- P. Manoj, Rahul Wadke. 2019. *Maharashtra's Water Scarcity hits Crisis Level*. 31 Mei. <https://www.thehindubusinessline.com/news/national/maharashtras-water-scarcity-hits-crisis-level/article27393500.ece>.
- Putu Merry Sukma Sasmita, Adi P. Suwecawangsa, Penny Kurnia Putri. 2020. "Upaya Pemerintah India Menggunakan Bantuan United State Agency for International Development (USAID) Dalam Menangani Krisis Air Bersih dan Sanitasi." *Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional* 1-9.
- Rahmat, Pupu Saeful. 2009. "Penelitian Kualitatif." *Equilibrium* 5 2-9.

- Sally, Madhvi. 2016. *Water Dips to Alarming Levels in many parts of India, no Water in Three Reservoirs in Maharashtra*. 7 April. <https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/water-dips-to-alarming-levels-in-many-parts-of-india-no-water-in-three-reservoirs-in-maharashtra/articleshow/51732402.cms>.
- Service, Express News. 2019. *Centre Sanctions Rs 4,714 Crore aid for Drought-hit Maharashtra*. 30 Januari. <https://indianexpress.com/article/india/centre-sanctions-rs-4714-crore-aid-for-drought-hit-maharashtra-5560422/>.
- Studio18. 2022. *How Govt Aims to Overcome Crisis in Districts Facing Water Scarcity*. 30 Juni. <https://www.news18.com/news/mission-paani/how-govt-aims-to-overcome-crisis-in-districts-facing-water-scarcity-5466091.html>.
- Times Now. 2019. *As Drought Hits Maharashtra, Shiv Sena says financial aid failed to reach villages, seeks help from centre*. 5 Juni. <https://timesofindia.indiatimes.com/videos/city/mumbai/as-drought-hits-maharashtra-shiv-sena-says-financial-aid-failed-to-reach-villages-seeks-help-from-centre/videoshow/69660565.cms>.
- Tjutju Susana. 2003. "Air Sebagai Sumber Kehidupan." *Oseana Vol.28 No.3* 21-22.
- UN Global Compact. n.d. *UN Global Compact's CEO Water Mandate*. Accessed Agustus 2, 2023. <https://www.unwater.org/about-un-water/members-and-partners/un-global-compact-ceo-water-mandate-un-global-compact>.
- Unacademy. 2023. *A Short Note on Government of Maharashtra*. 9 Maret. <https://unacademy.com/content/railway-exam/study-material/general-awareness/a-short-note-on-government-of-maharashtra/>.
- UNEP. n.d. *United Nations Environment Programme (UNEP)*. Accessed September 29, 2023. <https://www.unwater.org/about-un-water/members-and-partners/united-nations-environment-programme-unep>.
- UNESCO. n.d. *United National Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)*. Accessed September 29, 2023. <https://www.unwater.org/about-un-water/members-and-partners/united-nations-educational-scientific-and-cultural-organization>.
- United Nations. 2023. *2023 SDG Summit*. 1 September. Accessed September 29, 2023. <https://www.un.org/en/conferences/SDGSummit2023>.
- . 2023. *About UN-Water*. 15 Februari. <https://www.unwater.org/about-un-water>.
- . n.d. *Background IMI-SDG6*. Accessed September 29, 2023. <https://www.unwater.org/our-work/integrated-monitoring-initiative-sdg-6/background>.
- United Nations. 2023. *Blueprint for Accelerations: Sustainable Development Goal 6 Synthesis Report on Water and Sanitation 2023*. Executive Summary, New York: United Nations.
- . 2023. *Country Engagement*. 24 Juni. <https://www.unwater.org/our-work/country-engagement>.
- . 2023. *Donors*. 24 Juni. <https://www.unwater.org/about-un-water/donors>.
- . 2023. *Fast Facts - What is Sustainable Development?* 28 Agustus. Accessed September 29, 2023.

- https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2023/08/what-is-sustainable-development/?gclid=Cj0KCQjw1OmoBhDXARIsAAAYGSEHdOM97YFjN1Oev2cWDIU5nuQLYP6cMR-Uqm3Up7U0gg703pH_1p0aAqunEALw_wcB.
- . 2023. *Historic UN Conferences marks watershed moment to tackle global water crisis and ensure water-secure future*. 24 Maret. Accessed September 29, 2023.
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2023/03/press-release-historic-un-conference-marks-watershed-moment-to-tackle-global-water-crisis-and-ensure-water-secure-future/>.
- . 2023. *Inform Policies*. 25 Juni. <https://www.unwater.org/about-un-water/what-we-do/inform-policies>.
- . 2023. *Peace, Dignity and Equality on a Healthy Planet*. 15 Februari. <https://www.un.org/en/global-issues/water>.
- . 2023. *United Nations Children's Fund (UNICEF)*. 23 Juni. <https://www.unwater.org/about-un-water/members-and-partners/united-nations-childrens-fund-unicef>.
- . 2023. *What We Do*. 5 Juni. <https://www.unwater.org/about-un-water/what-we-do#:~:text=UN%2DWater%20coordinates%20the%20global,on%20key%20water%2Drelated%20issues>.
- . 2023. *World Health Organization (WHO)*. 23 Juni. <https://www.unwater.org/about-un-water/members-and-partners/world-health-organization-who>.
- Vasvi Vanika. 2022. *Jal Shakti Abhiyan*. 03 November. <https://www.geeksforgeeks.org/jal-shakti-abhiyan/>.
- Water.org. n.d. *Water.org*. Accessed Agustus 1, 2023. <https://www.unwater.org/about-un-water/members-and-partners/waterorg>.
- Wattimena, Josina Augusthina Yvonne. 2021. "Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat." *Balobe Law Journal* 2-14.
- Weather Spark. 2023. *Climate and Average Weather Year Round in Mumbai*. 9 Maret. <https://weatherspark.com/y/107286/Average-Weather-in-Mumbai-India-Year-Round>.
- WHO. 2023. *Drought*. 13 Maret. Accessed September 29, 2023. https://www.who.int/health-topics/drought?gclid=Cj0KCQjwk7ugBhDIARIsAGuvGPZ4IJCLv1Pm0z6zmtEucy_jMIP7tMzMq8qbgen1BdTJnXtBvr7UWzMaAvuXEALw_wcB#tab=tab_1.
- WMO. n.d. *World Meteorological Organization (WMO)*. Accessed September 30, 2023. <https://www.unwater.org/about-un-water/members-and-partners/world-meteorological-organization-wmo>.
- World Bank. 2019. *Helping India Overcome Its Water Woes*. 9 Desember. <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/12/09/solving-water-management-crisis-india>.
- WSSD. 2023. *About Water Supply and Sanitation Department*. 15 Februari. <https://water.maharashtra.gov.in/Site/Home/Index.aspx>.